

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian kolaborasi secara umum dapat dibedakan ke dalam dua pengertian pertama kolaborasi dalam arti proses mengatur atau mengelola secara institusional dengan melibatkan non-pemerintah. Menurut Emerson mendefinisikan *Collaborative Governance* secara lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dan manajemen dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang mengikutsertakan masyarakat secara konstruktif melewati batas-batas dari para agen publik, tingkat pemerintah, privat dan kewenangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.²⁷

Kolaborasi dalam konteks ini merupakan cara merespon terhadap perubahan sehingga pemerintah tetap aktif dan tetap efektif dalam suatu lingkungan dengan tetap melibatkan para instansi lain yang relevan dengan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian *stake holder* mana saja yang dilibatkan dalam kolaborasi, dalam bentuk proses kolaborasi akan berbeda-beda. Adanya kolaborasi dalam pengelolaan hutan mangrove disebabkan adanya ketergantungan dengan instansi lainnya.

Sesuai dengan teori Ansell dan Gash 2007, menjelaskan *Collaborative Governance* adalah suatu peraturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat

²⁷ Suryani. *Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Berfikir*. <http://www.google.co.id/url?sa=Ektivitas-Collaborative-Governance.PTPAS-BAB-II>. Diakses pada 2013

formal, berorientasi pada konsensus, deliberasi yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. Adapun serangkaian faktor bagi pemangku kepentingan meliputi komitmen, kepercayaan, kepemimpinan, kekuasaan, dialog atau barbagi informasi, dan sumber daya.²⁸

1.1. Komiten

Kebanyakan pemimpin atau pimpinan puncak tingkat pusat dan daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) bergantung pada bentuk organisasinya masing-masing daerah. Pelaksanaan komitmen ini tidak hanya sekedar janji seremonial yang diucapkan ketika pelantikan tetapi diperhatikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Demikian pula, pejabat yang diberikan kepercayaan oleh pemimpin tersebut tidak melakukan intervensi kepada aparat bawahannya, termasuk intervensi terhadap pengadaan barang/jasa instansi pemerintah karena sistem pengadaan barang/jasa berdasarkan keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 telah memenuhi syarat setiap satuan kerja maupun melaksanakan sesuai dengan kaidah yang telah digariskan dalam peraturan tersebut.²⁹

Komitmen organisasi merupakan salah satu dari beberapa jenis komitmen, dan secara umum komitmen dapat didefinisikan sebagai bentuk kewajiban yang mengikat seseorang pada suatu atau tindakan tertentu. Sedangkan

²⁸ Chris Ansell dan Alison Gash. *Tata Kelola Pemerintahan dalam Teori dan Praktik*. Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik. Vol.18, Edisi 4, 1 Oktober 2008, hlm 543-571. <http://doi.org/10.1093/jopart/mum032/article-abstract/18/4/543/1090370>.

²⁹ Yusuf. 2011. *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Salemba Empat. Hlm 330

organisasi merupakan bentuk kelompok sosial yang memiliki persepsi bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam berorganisasi karakteristik pribadi individu, karakteristik organisasi dan pengalaman selama berorganisasi. Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup kedalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi.

Komitmen dapat dicapai apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja sama anggota organisasi yang bersifat kolektif. Dengan kata lain merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.³⁰ Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa komitmen memiliki dimensi utama yaitu bersifat efektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian terhadap organisasi, dan beban moral untuk terus dengan organisasi.

Adapun Studi yang dikemukakan oleh Allen dan Meyer (2009) membagi komitmen organisasi menjadi tiga komponen yaitu : a). *Affective Commitment* terjadi apabila karyawan ingin bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional. b) *Continuance Commitment* muncul apabila karyawan tetap bertahan pada satu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan lain atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain, karena dia membutuhkan (*need to*). c) *Normative commitment* timbul dari nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen

³⁰ Arina Nurandini. 2014. *Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*. Vol 11, No 1. Hlm 79. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo>

terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan, jadi karena dia merasakan kewajiban (*ought to*).³¹

1.2. Kepercayaan

Kepercayaan sering sekali didefinisikan sebagai suatu sikap bahwa kebutuhan suatu pihak akan terpenuhi di masa mendatang dengan tindakan-tindakan yang di usahakan. Kepercayaan juga diyakini sebagai sarana kerja sama antar variabel penentu kesuksesan dalam berorganisasi yang berjangka panjang. Dan kepercayaan dirasakan sangat penting dalam sebuah hubungan antar organisasi, tanpa kepercayaan sebuah hubungan antara klien dan supplier tidak pernah berjalan untuk meaksimalkan kekuatan potensinya.³²

Dalam penyelesaian permasalahan sebuah organisasi pemerintah maupun non-pemerintah diperlukan adanya kepercayaan secara langsung, misalnya saling menghargai pendapat dari masing-masing anggota organisasi, dengan ini kepercayaan untuk tujuan bersama akan otomatis berlangsung. Adapun kepercayaan bersama secara tidak langsung, misalkan memberi kesempatan kepada masing-masing anggota pada sebuah organisasi dengan memberikan

³¹ Ida Respatiningsih. 2016. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi, Kapabilitas dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*. Jurnal UNTAG Semarang. Vol 4. Hlm 58. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/162&ved>.

³² Amak M. Yaqoub. 2012. *Pengaruh Mediasi Kepercayaan pada Hubungan Antara Kolaborasi Supply Chain dan Kinerja Operasi*. Jurnal manajemen dan kewirausahaan. Vol 14, No 2. Hlm 140. <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/18556&ved>

tanggung jawab atau wewenang pengambil keputusan jika suatu saat akan terjadi permasalahan secara tiba-tiba. Meskipun pengambilan wewenang hanya terletak pada kepala disebuah organisasi, akan tetapi jika hal tersebut terus berlangsung, maka sebuah organisasi tersebut telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga yaitu saling percaya antar *stake holder*.

Pentingnya kepercayaan bersama di dalam organisasi terutama ketika suatu saat terjadi perubahan maka dapat diselasikan dengan mudah. Hubungan antara kepercayaan dan kesiapan karyawan untuk berubah karena kepercayaan tersebut akan meningkatkan rasa aman terhadap masa depan, meningkatkan kerja sama dan merunkan prilaku permusuhan. Adapun manfaat dari kepercayaan itu sendiri yang pertama kepercayaan dapat menurunkan perasaan negatif karyawan seperti khawatir akan ketidakpasntian, kedua kepercayaan dapat meningkatkan keberanian menggabil resiko, ketiga kepercayaan dapat memberi peluang untuk bebas berpendapat, dan yang terakhir kepercayaan dapat meningkatkan produktivitas.

Selanjutnya dapat dilihat juga bahwa kepercayaan pada organisasi berhubungan positif dengan komitmen. Korelasi ini merujuk pada moore (1998) dapat terjadi karena kepercayaan merupakan keyakinan dalam diri atau kepercayaan dalam kerjasama dengan pihak lain dalam memberikan suatu hasil yang diinginkan di masa akan datang.³³ Adanya keyakinan pihak individu bahwa lembaga akan meberikan keuntungan bagi mereka akan menyebabkan mereka menyadi akan kerugian apabila meninggalkan organisasi tersebut.

³³ Yunita Zahra. 2012. *Hubungan Kepercayaan Karyawan pada Organisasi Terhadap Komitmen Kepada Organisasi pada PT. BANK X*. Psikologia online. Vol 7, No 2. Hlm 59. <http://www.journal.usu.ac.id/index.php/psikologia/article/view/1349&ved>

Riset terbaru memperlihatkan bahwa kepercayaan pada tingkat yang tinggi yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat. level kepercayaan yang tinggi memberi pondasi tatanan sosial, kerja sama yang sukses dan tim kerja yang efektif, serta berpengaruh positif pada pengembangan sosial ekonomi suatu negara.³⁴ Sebaliknya, tingkat kepercayaan yang rendah akan mencegah masyarakat dalam memanfaatkan human capital yang tersedia, dengan demikian rendahnya kepercayaan dalam masyarakat dan organisasi akan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh daya saing sehingga konsekuensinya karena manfaat dari rendahnya kepercayaan sangatlah nyata.

Diungkapkan bahwa kepercayaan merupakan sebuah faktor penentu yang penting dari kepuasan terhadap pemimpin karena berasal dari keadaan efektif (misalnya kekaguman terhadap pemimpin) maupun keadaan kognitif (misalnya pemimpin memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena kemampuan atau atributnya) bukan dari perilaku yang diamati pimpinan.³⁵ Kepercayaan juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk bergantung kepada pihak lain serta harapan bahwa pihak lain membalas apabila pihak tersebut bekerjasama.

1.3. Kepemimpinan

Sudah menjadi idaman dari masyarakat negara-negara di dunia jika kepala pemerintahan menerapkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga pemerintah mampu mengelola sistem secara baik pula. Secara teoritis *Good Governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan

³⁴ Sri Raharso. 2011 *Kepercayaan Dalam Tim*. Manajerial. Vol 10. No 19. Hlm 43. <http://ejournal.upi.edu/index.php/manajerial/article/download/2164/1516&ved>

³⁵ Untung Sriwidodo. 2012. *Pengaruh Kepemimpinan, Kepercayaan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia. Vol.2 No.1. Hlm 37 <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/manajemen/article/download/78/51&ved>

yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.³⁶ oleh karena itu salah satu tuntutan sekarang ini adalah memiliki pemimpin yang baik dimana pemerintah mampu melayani masyarakat dengan baik dan menciptakan ide-ide atau gagasan sehingga masyarakat merasa dipayungi oleh pemerintah.

Dalam arti luas, pemerintahan merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga/badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan auditif. Dan peran pemerintah dalam era saat ini sebagai pembuat keputusan dan mengayomi masyarakat sesuai yang dibutuhkan masing-masing daerah. Seluruh aktifitas pemerintah yang di bawah pemerintah pusat (Presiden) dalam pelaksanaannya diharuskan atau diwajibkan mematuhi aturan-aturan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

Tentunya suatu organisasi tidak menginginkan adanya gerakan masyarakat akibat kurang antisipatifnya pemerintah dalam merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat. kenyataanya, jika masyarakat merasakan bahwa pengelolaan pemerintah berlangsung secara baik dan mampu memberikan kesejahteraan kedepannya kepada masyarakat melalui berbagai pelayanan publik yang di terapkan, maka tentunya masyarakat akan mengatakan bahwa pemerintah layak untuk diperjuangkan selanjutnya, begitu pun sebaliknya jika pemerintah tidak mampu menjalankan fungsi dari pemerintah itu sendiri dengan tidak didasarkan pengetahuan yang tinggi, maka tanggapan masyarakat akan negatif kepada pemimpin.

³⁶ Ibid. Hlm 172

Pada umumnya semua bentuk dari pemerintahan memiliki satu sifat yang sama yaitu kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan, serta kekuasaan untuk menggerakkan semua pihak agar menaati hukum dan peraturan tersebut. Menurut rasyid (2002), beda antara sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak demokratis terletak pada kenyataan bahwa "dalam sistem yang demokratis, kewenangan atau kekuasaan pemerintah dibangun dan dipelihara berdasarkan kesepakatan dari rakyat, sedangkan pada sistem yang tidak demokratis kesepakatan rakyat tidak merupakan persyaratan."³⁷ Dan pada kenyatannya yang harus diterapkan pemerintah yaitu yang menerapkan sistem yang demokratis, rakyatlah yang memiliki kedaulatan dan mereka berhak mengganti sebuah pemerintahan.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan negara adalah untuk menjaga suatu sistem keterlibatan umum di dalam mana setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar.³⁸ Pemerintahan modern, pada hakekatnya adalah pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk memperdayakan dan mensejahterakan masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai pemerintah.

1.4. Kekuasaan

Kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan selama ini dipergunakan sangat sentralistis dan eksekutif. Semakin tinggi *layer* atau lapi hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi maka semakin besar kekuasaannya, dan semakin

³⁷ Rewansyah Asmawi. 2011. *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta : CV Yusaantasan Prima. Hlm 22

³⁸ Ibid. Hlm 23

rendah lapis heirarkinya maka semakin tidak berdaya (*Powerless*).³⁹ Adapun di luar hierarki seperti rakyat yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekuasaan birokrasi.

Penggunaan kekuasaan pada hierarki atas sangatlah tidak imbang dengan penggunaan kekuasaan di tingkat bawah. Rakyat yang mestinya memperoleh pelayanan dari pihak pemerintah tidak terpenuhi karena kekuasaan pemerintah yang sangat berkuasa maka situasinya membalik justru rakyat yang melayani pihak birokrasi. Penggunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan tidak ada bedanya dengan kehidupan politik di negara-negara maju. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah tidak mempunyai akuntabilitas terhadap rakyat.⁴⁰

Menurut Locke dalam karyannya *Two Treaties Of Government*, kekuasaan negara dibedakan atas tiga macam : *Legislative Power* (membuat undang-undang), *Executive Power*, (melaksanakan undang-undang), dan *federative power* (kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara asing).⁴¹

Dari ketiga macam kekuasaan tersebut sangat erat satu sama lainnya karena jika salah satu dari macam kekuasaan tersebut tidak terlaksana dengan semestinya maka kekuasaan akan pincang dan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi kerana penyimpangan dan kegagalan proses kerja yang terjadi tanggung jawabnya akan turut adil dalam tercapai tidaknya tujuan besar birokrasi itu sendiri.⁴²

³⁹ Thoha Miftah. 2005. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo. Hlm 12

⁴⁰ Ibid. Hml 13

⁴¹ Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. Malang : UUM Pres. Hlm 9

⁴² Said Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang : UUM Press. Hlm 111

Jenis lembaga birokrasi pusat banyak sekali ragamnya. Ada lembaga kementerian negara ada pula lembaga nonkementerian, selain itu ada juga lembaga pemerintah nonstruktural, ditambah lagi lembaga pemerintah dibidang usaha perekonomian yang dikenal dengan sebutan badan usaha milik negara.⁴³ Dari semua itu berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, hanya saja masing-masing lembaga dipercayai oleh kepala sesuai dengan lembaganya.

Kekuasaan mengandung suatu potensi/kemampuan yang belum tentu efektif dilaksanakan, dan suatu hubungan ketergantungan, bahkan seringkali masyarakat umum menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat.⁴⁴ Karena seseorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

1. Kesesuaian tujuan

Kesesuaian dalam kekuasaan dengan kata lain keselerasan yang berkaitan dengan pendapat, pemahaman, dan kecocokan antara pemegang kekuasaan atau pemimpin dengan yang dipimpinnya,

2. Arah pengaruh

Pemegang kekuasaan atau pemimpin negara, pemimpin organisasi, pemimpin instansi berfokus pada pengaruh atasannya kepada bawahan, sehingga dalam suatu organisasi arah untuk kedepannya mudah dikendalikan oleh pemegang kekuasaan. Arah pengaruh dari pihak

⁴³ Thoha Miftah. 2014. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta : KENCANA. Hlm 30

⁴⁴ Maria Merry Marianti. 2011. *Kekuasaan dan Taktik Mempengaruhi Orang Lain dalam Organisasi*. Jurnal Administrasi bisnis. Vol. 7, No. 1. Hlm 46. <http://www.googl.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url>

penguasa bukan hanya dituntut untuk mengatasi masalah pada suatu organisasi tertentu, melainkan juga mengatasi masalah secara luas.

3. Cara implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati dari beberapa pihak terkait dalam suatu keputusan. Sehingga cara implementasi kepemimpinan lebih menekankan pada cara yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sedangkan kekuasaan lebih fokus pada rencana untuk mendapatkan kesempatan.

4. Pemilik kekuasaan

Kepemimpinan merupakan individual yang memiliki kekuasaan, sedangkan kekuasaan bukan hanya dimiliki individu tertentu, namun juga dimiliki oleh beberapa kelompok. Pemilik kekuasaan biasanya akan membantu satu pihak untuk mengambil sebuah keputusan.

1.5. Berbagi Informasi

Berbagi dengan kata lain pemakaian bersama atas sumber daya atau ruang dalam aktivitas manusia yang berlaku secara alami. Sedangkan informasi merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalkan informasi akan didapat melalui interaksi individu dan individu atau interaksi sebuah organisasi, dan yang paling umum informasi didapat dari sosial media. Dengan adanya informasi seseorang akan menangkap ilmu pengetahuan yang mungkin menurutnya baru dan penting untuk dibahas atau diterapkan ke dalam kehidupannya, sehingga informasi bisa membuat seseorang berubah dari kondisi sebelumnya.

Berbagi ilmu pengetahuan memiliki empat ruang dimensi yang pertama ruang aterial merupakan ruang pertemuan dimana individu dapat berkomunikasi secara tatap muka satu sama lain dalam aktivitas kesehariannya, ke dua ruang informasi lebih memudahkan seseorang untuk dapat partisipasi aktif dalam komunitasnya dimanapun mereka berada tanpa dibatasi oleh ruang fisik yang terbatas seperti material, ke tiga ruang alam pikir lebih didasari adanya koneksi kesamaan dalam berfikir antara satu dengan yang lain tanpa harus berbentuk tertulis, dan yang terakhir ruang sosial, terjadi dua individu atau lebih bertemu karena suatu organisasi, satu daerah atau satu profesi.⁴⁵

1.6. Akses Sumber Daya

1. Keuangan

Dalam sebuah organisasi pengaturan keuangan sering disebut manajemen keuangan, kegiatan ini biasanya meliputi kontrol, pemanfaatan, perencanaan pengopeasian dengan tuntutan sesuai dengan kebutuhan. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (diganti dengan PP nomor 58 tahun 2005), tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka

⁴⁵ Sumarlin. 2013. *Pengaruh Wadah Berbagi Pengetahuan Terhadap Komitmen dari Komunitas Merk*. Journal system. Vol. 12, No. 1. Hlm 92-93. <http://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek/article/download/504/417&ved>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁴⁶ Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan hasil daerah dibandingkan dengan yang berasal dari sumber lainnya.

Pemerintah sebagai peran pertama pelaksanaan *Good Governance* dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. Karena penerapan *Good Governance* menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan yang didasarkan pada prinsip transparansi dan keadilan. Baik buruknya laporan keuangan adalah salah satunya dapat dilihat implementasi pemerintahan.

Djail (2014) juga menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan perwujudan dari akuntabilitas keuangan suatu pemerintah.⁴⁷

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut.⁴⁸ Namun pada praktiknya masih mendapati organisasi pemerintah yang tidak mencerminkan akuntabilitas. Karena hal tersebut harus memiliki penjelasan yang memadai sesuai dengan standart layanan operasional selaku pihak yang terlibat dalam suatu organisasi.

2. Teknis

Teknis sering dikaitkan dengan aturan-aturan atau norma yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan dalam bentuk sebuah

⁴⁶ Hendawati. 2017. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja keuangan di Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol.5, No.3. Hlm 1645. <http://dx.doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9229>

⁴⁷ Finda Dwi Sari. 2017. *Determinan Implementasi Good Governance Serta Implikasinya pada akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 3 No1. Hlm 5. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jaku/article/view>

⁴⁸ Kristian Widya Wicaksono. 2015. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik. Vol 19 No 1. Hlm 4. <http://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view>

dokumen formal. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diperhatikan penjabaran lebih lanjut. Hasil KTT pembangunan berkelanjutan tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.⁴⁹

3. Manusia

Manusia seperti halnya semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dan ia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya ia mempengaruhi lingkungan hidup. Manusia seperti adanya, yaitu fenotipenya terbentuk oleh interaksi antara genotipe dan lingkungan hidupnya, genotipe itu tidak konstan melainkan terus-menerus mengalami perubahan karena adanya mutasi pada gen dalam kromosomnya, baik mutasi spontan maupun mutasi pengaruh lingkungan.⁵⁰ Dari uraian singkat tersebut sudah nampak bahwa manusia tergantung pada lingkungan hidupnya.

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi, karena keberhasilan informasi sangat bergantung pada kualitas dan kinerja individu-individu yang ada dalam organisasi.⁵¹ Disamping itu proses interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya sangat mempengaruhi pandangan hidup manusia. Salah satu konsekuensi

⁴⁹ Budiati Lilin. 2012. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 20

⁵⁰ Sumarwoto. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS. Hlm 17

⁵¹ Albert Kurniawan. 2015. *Pengaruh komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) PT X Bandung*. Maranatha Journal. Vol 15, No 1. Hlm 95. <http://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/28&ved=2ahUKEwjwvPe>

logis dari kenyataan demikian adalah manajemen sumber daya manusia harus peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi sekitar organisasi.

Sebagai faktor utama dan pertama dalam proses pembangunan, SDM selalu menjadi subek dan objek pembangunan. Proses administrasi pun sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia, dan ada tiga macam klasifikasi sumber daya manusia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ermaya (1996): a. Manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menempatkan, mengendalikan dan mengarahkan pencapaian tujuan yang disebut administrator. b. Manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan memimpin usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tertacapi sesuai rencana disebut manajer. c. Manusia atau orang-orang yang mempengaruhi syarat tertentu, diangkat langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya.⁵²

4. Sumbe Daya

Sumber Daya Alam diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang telah digunakan atau yang akan digunakan di masa yang akan datang.⁵³ Secara umum, sumber daya alam yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya terbagi dalam dua golongan yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperparui. Yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaanya akan selalu ada jika dengan bantuan manusia untuk mengembangkannya, sedangkan sumber daya alam yang

⁵² Subekhti Akhmad. 2012. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)*. Jakarta : prestasi Pustakarya. Hlm 13

⁵³ Sunu Pramudya. 2001. *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*. Jakarta : PT Grasindo. Hlm 36

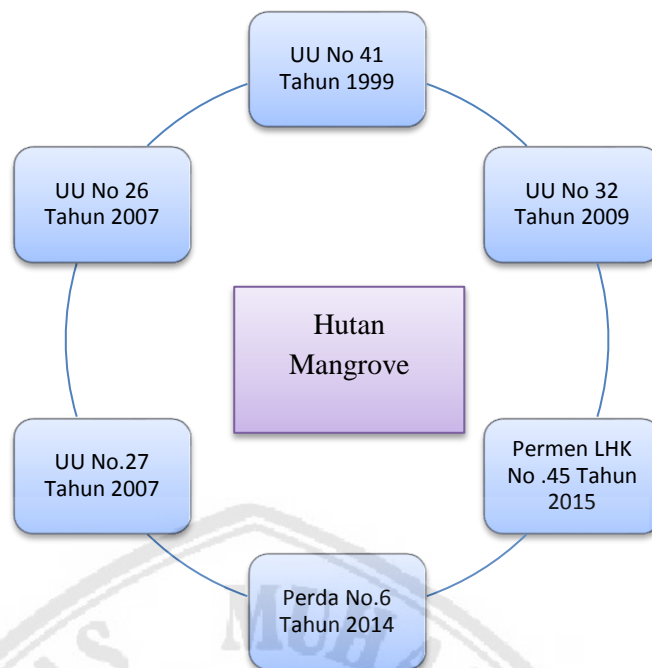
tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbatas dan akan habis dalam sekali pakai saja.

Perhatian untuk menjaga kualitas sumber daya alam ini menjadi suatu perhatian khusus dalam pengelolaannya. Jika dikaitkan dengan pengelolaan hutan maka hutan mangrove adalah hal utama yang sering berdampak positif dan negatif pada lingkungan sekitar, karena hutan mangrove berada di sepanjang garis pantai dengan berbagai macam manfaat yang dihasilkan. Misalkan manfaat utama dari hutan mangrove yaitu menjaga keseimbangan ombak di sepanjang garis pantai yang berdampak pada semua aspek kehidupan sehingga akan muncul aturan-aturan yang mengatur khusus hutan mangrove untuk selanjutnya.

1.7. Peraturan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Taman Nasional Baluran Situbondo

Berbagai peraturan kebijakan dibuat untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan mangrove khususnya pada Hutan Mangrove Taman Nasional Baluran Situbondo.

Gambar 2.1 Peraturan Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Taman Nasional Baluran Situbondo.



Sumber : Diolah

Pada gambar 2.1 diketahui bahwa pengelolaan hutan mangrove di Taman Nasional Baluran Situbondo mendapat dukungan dari berbagai pihak, karena pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah membutuhkan aktor-aktor pelaksanaan kebijakan. Alasan mendasar pengelolaan hutan angrove merupakan wujud dari pemerintahan kolaboratif, dan pengelolaan ini melibatkan pemerintah dan non-pemerintah pada prosesnya. Disamping itu, isu-isu aktivitas pemerintahan kolaboratif seperti koitmen, kepemimpinan, kelembagaan, sumber daya, serta perencanaan ada pada pengelolaan hutan mangrove.